

PERBANDINGAN MODEL INTERVENSI KOMUNITAS DALAM PRAKTIK MAKRO PEKERJAAN SOSIAL

A COMPARISON OF COMMUNITY INTERVENTION MODELS IN SOCIAL WORK MACRO PRACTICE

Abu Huraerah

Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat 40261

E-mail: huraerah_ks@unpas.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan membandingkan beberapa model intervensi komunitas dalam praktik makro pekerjaan sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari beberapa sumber buku dan jurnal yang terkait dengan model intervensi komunitas atau pengembangan masyarakat, kemudian memberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Studi ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dialami masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah masalah-masalah yang lebih banyak bersifat sosial ekonomi dari pada masalah-masalah psikologis. Sebagai alternatif, telah dikembangkan pekerjaan sosial yang berorientasi pada pembangunan. Terdapat berbagai model intervensi komunitas, antara lain: (1) model Rothman, (2) model Glen, serta (3) model Netting dan kawan-kawan. Dalam praktiknya, ketiga model intervensi komunitas ini dapat dilakukan bersamaan karena bersifat saling melengkapi antara model yang satu dengan model yang lainnya. Berbagai model intervensi komunitas tersebut merupakan konsep penting yang perlu dipahami dan dipraktikkan dalam setting makro pekerjaan sosial, yakni di level masyarakat lokal. Studi ini merekomendasikan tentang perlunya dilakukan penelitian yang mendalam berkaitan dengan perbandingan model intervensi komunitas yang dapat menghasilkan pengetahuan yang membumi (*indigenous knowledge*) dalam konteks masyarakat lokal Indonesia sebagai landasan ilmiah untuk dikembangkan dan dapat diaplikasikan (*applicable*) bagi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu masyarakat lokal, pemerintah, akademisi atau peneliti, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri.

Kata Kunci: model, intervensi komunitas, praktik makro pekerjaan sosial, studi literatur.

Abstract

This article aims to compare some certain models of community intervention in social work macro practice. The method used is a literature study, namely by collecting and analyzing data from books and journals related to the community intervention or community development model as well as providing some conclusions and recommendations. This study shows that the problems experienced by the people in developing countries, including Indonesia, are mostly socio-economic problems rather than psychological ones. As an alternative, development-oriented social work practice has been carried out. There are various community intervention models, including: (1) the Rothman's model, (2) the Glen's model, and (3) the Netting's model et al. In practice, these three community intervention models can be carried out simultaneously because they complement one and another. These various community intervention models are the important concepts that need to be understood and practiced in the setting of social work macro, namely at the local community level. This study recommends the need for in-depth research related to the comparison of community intervention models that can produce indigenous knowledge in the local society context of Indonesian as a scientific basis to be developed and applicable for the benefit of the stakeholders, namely

local communities, governments, academics or researchers, non-governmental organizations, as well as the business and industrial world.

Keywords: *model, community intervention, social work macro practice, literature review.*

PENDAHULUAN

Pekerjaan sosial yang lebih sesuai untuk dipraktikkan di negara-negara berkembang adalah pekerjaan sosial dalam penanganan masalah yang bersifat sosial ekonomi. Hal ini karena masalah yang dialami masyarakat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada umumnya lebih banyak masalah sosial ekonomi dibandingkan dengan masalah-masalah psikologis. Dengan demikian, sebagai alternatif telah dikembangkan pekerjaan sosial yang berorientasi pada pembangunan (Sanders, 1982; Midgley, 1997). Pekerjaan sosial seperti ini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang yang tengah melaksanakan usaha-usaha pembangunan. *“If social work is to survive as a profession, it needs to transcend its narrow concern with remedial practice and promote activities that make a positive contribution to social well-being.”* (Midgley, 1997).

Terkait dengan perkembangan pekerjaan sosial dalam konteks yang lebih khusus di Indonesia, Ragab (Hakim, 2010) menjelaskan beberapa permasalahan epistemologis, yaitu pertama, negara berkembang seperti Indonesia memiliki latar belakang yang jelas-jelas berbeda dengan negara Dunia Pertama. Contoh paling sederhana adalah kapasitas budaya yang menyokong sistem *social work* Dunia Pertama industri sangat kuat. Sementara, di negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga, sebagian besar masih berbudaya pertanian. Kedua, selain sejarah dan visualisasi budaya yang berbeda, negara berkembang seperti Indonesia juga memiliki masalah sosiologis, budaya, dan bahkan sistem produksi pengetahuan yang berbeda dengan negara maju.

George (Hakim, 2010) mencatat bahwa ada sebuah gerakan ke arah pembangunan sosial atau *social work* makro di beberapa negara di Asia. *“Social workers* sedang disiapkan untuk *community work* di level perdesaan dan lain-lain, mereka dilatih sebagai fungsionaris di level bawah untuk kementerian-kementerian di pemerintah; atau sebagai aktivis-aktivis sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat; atau untuk bekerja di bidang administrasi dan perencanaan sosial. Cox (Hakim, 2010, 62) menyatakan *“pembangunan sosial adalah pondasi yang sesuai bagi pendidikan social work, dalam praktik lokal, partisipasi masyarakat, perencanaan sosial, dan pengakuan interdependensi internasional.”* Menurut George (Hakim, 2010, 62-63), setidaknya ada tiga jalan untuk gerakan ini, yaitu (1) melestarikan *“kurikulum generik”*, (2) *“indigenisasi”* (yang mengembangkan materi pengajaran lokal sejak tahun 1975 melalui *Asian and Pacific Association for Social Work Education*, dan (3) meningkatkan *“suatu kesadaran regional dan internasional.”*

Terdapat sebuah model *social work* yang dominan, yaitu *social work* individual dan keluarga, atau *social work* konvensional. Arus *social work* dominan ini tidaklah bebas dari ideologi politik negara, khususnya di banyak negara maju, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, politik – di samping jenis masalah-masalah sosialnya – membentuk model *social work* yang mapan (Hakim, 2010).

Arus dominan *social work* di atas telah ditentang di banyak negara berkembang di Dunia Ketiga. Kritik tersebut muncul pada seputar dua sisi, pertama, terkait dengan ketidakseimbangan antara jenis *social work*

yang dikembangkan dan masalah-masalah sosial yang khas di negara-negara berkembang; kedua, isu tidak kompetibelnya metode-metode *social work* yang diimpor dengan unsur-unsur lokal para klien di banyak negara berkembang telah melahirkan lembaga-lembaga yang tidak efisien dan tidak sesuai. Solusi yang ada adalah, pertama, dengan menyesuaikan pendekatan *social work* dengan masalah-masalah khas di negara-negara berkembang, sebuah masalah menentukan sebuah metode; dan kedua, dengan mencari akar *social work* dalam kultur lokal yang ada, dengan menggunakan bahasa budaya tertentu (Hakim, 2010).

Mencermati hal di atas, landasan pekerjaan sosial yang lebih ramah dan lebih sesuai dengan nuansa dan dinamika masyarakat lokal sejatinya dapat dimanifestasikan secara nyata. Dengan demikian, tidak semata-mata mereplikasi atau meniru konstruksi pengetahuan pekerjaan sosial dengan latar belakang budaya tertentu – yang justru berbeda dengan latar belakang budaya Indonesia. Untuk itu, perlu membangun dan mengembangkan pengetahuan lokal/pribumi (*indigenous knowledge*) pekerjaan sosial – yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman praktik dan penelitian dari kondisi masyarakat lokal Indonesia.

Artikel ini bertujuan membandingkan beberapa model intervensi komunitas dalam praktik makro pekerjaan sosial. Berbagai model intervensi komunitas ini menjadi penting untuk dipahami yang pada gilirannya dapat dipraktikkan dalam *setting* makro pekerjaan sosial, yakni di level komunitas atau masyarakat lokal.

Tingkat lokal juga dapat dikonseptualisasikan dalam hal individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, mengingat pentingnya semua jenis unit ini dalam keterlibatan mereka dalam sebagian besar situasi yang tercakup dalam pengembangan masyarakat

tingkat lokal (Pawar, 2014). Masalah-masalah di level komunitas yang perlu menjadi fokus perhatian adalah seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pengertian Pengembangan Masyarakat

Istilah *community work*, *community development*, *community organization*, *community action*, *community practice*, dan *community change* pada umumnya digunakan secara bergantian, meskipun ada perbedaan penting serta tidak ada konsensus yang jelas mengenai nuansa makna yang berbeda yang menyiratkan masing-masing (Ife, 2002). Disamping itu, terdapat istilah lain yang mirip dengan istilah-istilah tersebut, yaitu *community intervention* (Rothman, 1995).

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (*community organization and community development*) merupakan salah satu metode dalam pekerjaan sosial yang diarahkan kepada masyarakat atau komunitas. Hawtin & Smith, (2007) mengatakan bahwa “*community development is the process of collective action to achieve social justice and change by with communities to identify needs and take action to meet them. It is based on an agreed set of values and is particularly important to vulnerable groups and disadvantaged communities*” (pengembangan masyarakat adalah proses tindakan kolektif untuk mencapai keadilan sosial dan perubahan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan mengambil tindakan untuk memenuhinya. Hal ini didasarkan pada seperangkat nilai yang disepakati dan khususnya sangat penting bagi kelompok rentan dan masyarakat yang tidak beruntung).

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (Rothman, Erlich, Tropman & Cox, 1995, 28)

bahwa “*community development can be tentatively defined as a process designed to create conditions of economic and social progress for the whole community with its active participation and the fullest possible reliance on the community’s initiative*” (pengembangan masyarakat secara tentatif dapat didefinisikan sebagai proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi kemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan ketergantungan penuh pada inisiatif masyarakat).

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama (Raharjo, 2006). Menurut Zamhariri (Graha, 2009), pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari beberapa definisi pengembangan masyarakat dan pembangunan masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa inti dari pengembangan masyarakat, adalah (1) proses tindakan kolektif, artinya terdapat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (dengan masyarakat); (2) bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan perubahan masyarakat ke arah kemajuan, baik secara ekonomi maupun sosial; (3) dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah, serta tindakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah tersebut; (4) sasarannya adalah seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan tidak beruntung; dan (5) perlunya partisipatif aktif dan inisiatif masyarakat secara penuh dalam aktivitas pengembangan masyarakat tersebut.

Model Intervensi Komunitas

Sejumlah penulis telah mengusulkan model untuk mengubah sistem komunitas. Masing-masing model ini mengharuskan pekerja sosial mengambil peran profesional berbeda yang membutuhkan spesialisasi seperangkat keterampilan profesional. Meskipun ada beberapa tumpang tindih dari model yang disajikan di bawah ini, mereka mewakili model yang telah banyak digunakan dalam pekerjaan sosial untuk dipikirkan tentang peran profesional dan keterampilan yang diperlukan dalam makro pekerjaan sosial.

Untuk dapat menerapkan metode intervensi komunitas secara baik, seorang pekerja sosial perlu memilih dengan cara apa intervensi komunitas tersebut dilakukan. Cara-cara penerapan tersebut dikenal dengan istilah teknik, atau sebagian orang menyebutnya sebagai taktik pelaksanaan kegiatan. Banyak teknik yang dapat dipilih oleh pekerja sosial. Pemilihan atas teknik-teknik tersebut harus didasarkan atas asesmen yang telah dilakukan pada tahapan pelayanan sebelumnya bersama dengan masyarakat sebagai sistem klien (sistem penerima pelayanan).

A. Model Rothman

Rothman (1995) membagi pengorganisasian masyarakat yang kemudian dinamakan sebagai intervensi komunitas ke dalam tiga model utama, yaitu:

1. Model A: Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Model ini diterapkan pada masyarakat yang mengalami anomie dan kemurungan sosial, didalamnya terdapat kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan masalah secara demokratis dan komunitas tradisional yang statis. Tujuan utama model ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat. Proses dianggap

lebih penting dibandingkan dengan hasilnya itu sendiri (*process oriented*).

Model ini difokuskan kepada seluruh atau sebagian warga masyarakat, dengan asumsi dasar bahwa semua warga masyarakat mempunyai kepentingan yang sama. Dengan mereka saling memahami adanya kepentingan yang sama, maka mereka akan bekerja sama untuk mencapai konsensus mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya.

Kegiatan pekerja sosial dalam penerapan model ini adalah memaksimalkan partisipasi warga masyarakat dalam penyusunan suatu rencana pembangunan yang rasional, termasuk pemecahan masalah. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan sebagai katalisator guna berlangsungnya perubahan dan membimbing setiap kelompok untuk mencapai tujuan.

2. Model B: Model Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Model ini diterapkan pada masyarakat yang memiliki masalah sosial yang lebih jelas, misalnya mengalami masalah kesehatan fisik dan mental, perumahan atau permasalahan rekreasi. Model ini diarahkan untuk memecahkan masalah dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang paling dianggap penting oleh masyarakat tersebut dan bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin penduduk. Tujuan tugas menjadi orientasi utama dalam penerapan model ini (*goal oriented*).

Perencana sosial harus bekerja dengan pemerintah (*power structure*) dan harus

menguasai keahlian teknis dalam pengkajian kebutuhan, penentuan dan analisis alternatif, dan pengambilan keputusan tentang tindakan yang tepat. Perencanaan perubahan dan penyediaan pelayanan sosial, terutama yang baru, kerap kali menimbulkan konflik karena tidak mungkin memuaskan setiap orang. Prinsip dalam pengambilan keputusan adalah "*the good of many*".

3. Model: Aksi Sosial (*Social Action*)

Model ini diterapkan pada populasi yang dirugikan oleh pihak lain, atau di dalamnya terdapat kesenjangan sosial, terjadi perampasan hak atau terjadi ketidakadilan. Model ini diterapkan untuk pengalihan sumber daya dan kekuasaan, dan untuk melakukan perubahan istitusi-institusi dasar. Tujuan tugas maupun tujuan proses dalam model ini, keduanya dianggap sama-sama penting. Dengan kata lain, model ini digunakan oleh kelompok atau organisasi (termasuk di tingkat nasional) yang merasa tidak mempunyai cukup kekuatan atau sumber untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya.

Aksi sosial ini menggunakan konflik secara sadar sebagai cara untuk mengkonfrontasi pihak yang berkuasa (pemerintah dan pengusaha misalnya) sehubungan dengan terjadinya ketidakadilan sosial atau keterlantaran. Apabila terjadi konsensus, maka ini hanya merupakan kompromi. Pekerja sosial dalam hal ini berperan sebagai advokat, aktivis, agitator, pialang atau negosiator

Tabel 1. Tiga Model Intervensi Komunita

	Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal)	Model B (Perencanaan Sosial/Kebijakan Sosial)	Model C (Aksi Sosial)
1. Kategori-kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat	Kapasitas dan pengintegrasian masyarakat: kemandirian (tujuan proses).	Pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah penting yang ada pada masyarakat (tujuan tugas).	Pergeseran sumber daya dan relasi kekuasaan: perubahan institusi dasar (tujuan proses atau tugas).
2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahan	Adanya anomie dan kemurungan dalam masyarakat; kesenjangan relasi dan kapasitas dalam pemecahan masalah secara demokratis; komunitas berbentuk tradisional statis.	Masalah sosial yang substantif, kesehatan fisik dan mental, perumahan dan rekreasional, dan sebagainya	Populasi yang dirugikan, ketidakadilan sosial, perampasan hak, dan ketidaksetaraan.
3. Strategi perubahan dasar	Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri.	Pengumpulan data yang terkait dengan masalah, memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional.	Kristalisasi dari isu dan pengorganisasian masyarakat untuk menghadapi sasaran yang menjadi musuh mereka.
4. Karakteristik taktik dan teknik perubahan	Konsensus: komunikasi antarkelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, diskusi kelompok.	Konsensus atau konflik.	Konfrontasi konflik, aksi yang bersifat langsung, negosiasi.
5. Peran praktisi yang menonjol	Anabler-katalis, koordinator: orang yang mengajarkan keterampilan memecahkan masalah dan nilai-nilai etis.	Pengumpul dan penganalisis data, pengimplementasi program, dan fasilitator.	Aktivis, advokat, agitator, broker, negosiator, partisipan.
6. Media perubahan	Membimbing kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tugas.	Membimbing organisasi formal dan data yang tersedia.	Membimbing organisasi massa dan proses-proses politik.
7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai kolaborator dalam suatu 'ventura' yang bersifat umum.	Struktur kekuasaan sebagai pemilik dan sponsor (pendukung)	Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan, mereka yang memberikan tekanan harus dilawan dengan memberikan tekanan balik.
8. Batasan definisi penerima sistem pelayanan	Keseluruhan komunitas geografis.	Keseluruhan komunitas atau dapat pula suatu segmen dalam komunitas (termasuk komunitas fungsional)	Segmen dalam komunitas

9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok dalam suatu komunitas	Kepentingan umum atau permufakatan dari berbagai perbedaan.	Permufakatan kepentingan atau konflik.	Konflik kepentingan yang sulit dicapai kata mufakat, kelangkaan sumber daya.
10. Konsep mengenai penerima pelayanan	Warga masyarakat.	Konsumen.	Korban.
11. Konsep mengenai peran penerima pelayanan	Partisipan pada proses interaksional pemecahan masalah.	Konsumen atau resipien (penerima pelayanan)	<i>Employer</i> , konstituen, anggota
12. Pemanfaatan pemberdayaan	Mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama; serta membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat.	Mencari tahu dari para pengguna jasa tentang pelayanan apa yang mereka butuhkan; serta memberitahukan kepada para pengguna jasa tentang pilihan jasa yang ada.	Meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang tertindas agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat untuk melakukan aksi, serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka.

Sumber: Rothman (Rothman, Erlich, Tropman, & Cox, 1995, 44-45)

B. Model Glen

Glen (1993) mengungkapkan bahwa intervensi komunitas dilakukan dengan menggunakan tiga model, yaitu pengembangan masyarakat (*community development*), aksi komunitas (*community action*), dan pendekatan pelayanan masyarakat (*community service approach*). Kemudian, Glen memberikan penekanan untuk membedakan ketiga model ini dilihat dari aspek tujuan, partisipan, metode, dan peranan dari *community worker* dalam suatu proses intervensi sosial.

1. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Model pengembangan masyarakat memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat, di mana masalah sosial itu berada secara langsung sehingga masyarakat

setempat mampu menangani sendiri masalah sosial tersebut. Masyarakat sendiri yang mendefinisikan masalahnya dan mencoba memenuhi kebutuhan yang saat itu benar-benar menjadi kebutuhan penyandang masalahnya. Metode yang dikembangkan dengan menyediakan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana-prasarana dasar yang dibutuhkan penyandang masalah atau calon penerima manfaat. Peran yang dapat dilakukan pekerja sosial adalah pelayanan administratif.

2. Aksi Komunitas (*Community Action*)

Model aksi komunitas bertujuan mengkampanyekan kebijakan sosial yang terkait dengan masalah sosialnya. Apakah kebijakan tersebut belum ada atau sudah ada, tetapi belum relevan maupun adanya

diskriminasi penerapan dari kebijakannya. Dalam menelisik kebijakan tersebut kelompok-kelompok dapat mengorganisir dirinya ke dalam kelompok sosial tertentu, sehingga kebijakan yang benar-benar dibutuhkan itu ada dan relevan. Metode yang dikembangkan mengkampanyekan isu-isu yang konkret pada saat ini sedang menjadi perbincangan sebagian besar atau seluruh lapisan masyarakat. Peran yang dapat dilakukan pekerja sosial adalah dengan memobilisasi kekuatan yang dimiliki masyarakat tersebut.

3. Pendekatan Pelayanan Masyarakat (*Community Services Approach*)

Metode pelayanan masyarakat bertujuan mengembangkan organisasi sosial yang ada. Organisasi sosial yang sudah terbentuk menjalin kemitraan dengan sesamanya atau dengan organisasi lain yang sama-sama memiliki perhatian terhadap masalah sosial dimaksud. Metode yang dapat dikembangkan dengan terus melakukan pengembangan hubungan antar lembaga yang ada di sekitar masyarakat. Lembaga dimaksud adalah lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, ataupun perguruan tinggi. Peran yang dapat dilakukan pekerja sosial adalah sebagai manajer yang dapat melakukan restrukturisasi ini semata-mata untuk penanganan masalah sosial

Tabel 2. Tiga Bentuk Praktik di Masyarakat (*Community Practice*)

	Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	Aksi Komunitas (<i>Community Action</i>)	Pendekatan Pelayanan Masyarakat (<i>Community Services Approach</i>)
Tujuan	Mengembangkan kemandirian masyarakat.	Kampanye untuk kepentingan masyarakat serta kebijakan untuk masyarakat.	Mengembangkan organisasi yang berorientasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Partisipan	Masyarakat yang mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri.	Kelompok-kelompok yang tertekan mengorganisasi diri untuk meningkatkan kekuatan.	Organisasi dan pengguna pelayanan sebagai rekanan.
Metode	Menggunakan proses kreatif dan kooperatif.	Menggunakan teknik kampanye pada isu-isu konkrit	Memaksimalkan keterlibatan pengguna pelayanan atau masyarakat, serta mengembangkan hubungan antarlembaga.
Peranan	Tenaga profesional bekerja menitikberatkan pada non-direktif.	Aktivis dan organisatoris (<i>organizer</i>) yang memobilisasi massa untuk aksi politis.	Manajer lembaga yang memberikan pelayanan merestrukturisasi transaksi yang ada bersama (atau dengan mempertimbangkan kepentingan) pengguna pelayanan.

Sumber: Glen (Adi, 2008: 138)

C. Model Netting dan Kawan-kawan

Brager & Holloway (1978), Brager, Specht, & Torczyner (1987), Netting, Kettner, & McMurty (1993) menyatakan bahwa dalam literatur pekerjaan sosial, taktik dibagi menjadi

tiga kategori besar: kolaborasi (*collaboration*), kampanye (*campaign*), dan kontes (*contest*). Istilah-istilah ini untuk menggambarkan hubungan antara aksi dan sistem target. Kolaborasi (*collaboration*) menyiratkan

hubungan kerja di mana kedua sistem sepakat bahwa perubahan harus terjadi, sedangkan taktik kontes (*contest*) menunjukkan ketidaksepakatan antara kedua sistem tersebut. Taktik kampanye (*campaign*) digunakan ketika target harus yakin akan pentingnya perubahan, tetapi ketika komunikasi masih memungkinkan antara kedua sistem. Efektivitas "kampanye" dapat menentukan apakah kolaborasi atau kontes akan mengikuti. Taktik kontes digunakan ketika tak satu pun dari dua lainnya memungkinkan lagi. Upaya perubahan dimulai dengan satu set taktik dapat berkembang ke set taktik yang lain, tergantung pada hubungan yang berkembang antara tindakan dan sistem target. Kontinum kategori-kategori taktis ini adalah digambarkan sebagai berikut:

Kolaborasi	Kampanye	Kontes
------------	----------	--------

Dengan mengambil kerangka berpikir mengenai ketiga taktik dari Brager & Holloway tersebut, Netting, Kettner & McMurty (1993) mengembangkannya ke dalam sebuah model intervensi komunitas, yaitu:

1. Kolaborasi (*Collaboration*)

Kolaborasi dilakukan apabila sistem sasaran setuju (mudah teryakinkan untuk sepakat) dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan alokasi sumber.

Dua jenis teknik kolaborasi yaitu:

a. Implementasi (*Implementation*)

Digunakan manakala sistem kegiatan dan sasaran bekerja sama dengan kesepakatan akan perubahan yang diinginkan serta adanya dukungan pengambil keputusan akan alokasi dana yang dibutuhkan.

b. Membangun Kapasitas (*Capacity Building*)

1) Partisipasi (*Participation*)

Mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk melibatkan anggota sistem klien dalam usaha perubahan.

2) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan adalah proses menolong suatu kelompok atau masyarakat untuk mencapai pengaruh secara politik atau otoritas hukum yang relevan (Barker, 1987). Dalam teknik pemberdayaan, upaya diarahkan untuk memungkinkan orang menyadari akan hak-haknya, dan mengajari mereka mengenai cara mengolah hak-haknya, sehingga mereka lebih memiliki kemampuan dalam mengendalikan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini seringkali ditemukan bahwa masyarakat yang miskin dan berpendidikan rendah, tidak mengerti apa hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Misalnya, hak untuk memperoleh pelayanan sosial atau hak untuk hidup layak. Dengan demikian, mereka tidak mengerti bagaimana cara memperolehnya. Untuk itu, mereka disadarkan dengan pemberian pengetahuan yang sesuai, selanjutnya mereka dibimbing dan didorong untuk memperolehnya.

2. Kampanye (*Campaign*)

Teknik ini perlu untuk dilakukan apabila sistem sasaran tidak menolak untuk berkomunikasi dengan sistem kegiatan, akan tetapi konsensus akan perlunya perubahan belum tercapai, atau sistem sasaran mendukung perubahan tetapi tidak ada alokasi sumber untuk perubahan tersebut. Termasuk ke dalam kategori teknik kampanye adalah:

a. Teknik Edukasi (*Education*)

Sistem perubahan berinteraksi dengan sistem sasaran dengan menyajikan

berbagai persepsi, sikap, opini, data dan informasi mengenai perubahan yang diinginkan, dengan tujuan untuk meyakinkan sistem sasaran mengubah cara berfikir atau bertindak, yang selama ini dianggap kurang sejalan dengan perubahan yang diperlukan.

b. Teknik Persuasi (*Persuasion*)

Mengacu pada seni untuk meyakinkan orang lain agar menerima dan mendukung pandangan-pandangannya atau persepsinya mengenai suatu isu. Dengan kata lain, seorang pekerja sosial berupaya melakukan:

1) Kooptasi (*Cooptation*)

Meminimalkan kemungkinan terjadinya oposisi dengan cara menyerap atau melibatkan anggota-anggota sistem sasaran ke dalam sistem kegiatan. Pelibatan anggota kelompok sasaran secara individual disebut "*Informal Cooptation*", sedangkan melibatkan sistem sasaran secara kelompok disebut "*Formal Cooptation*".

2) Lobi (*Lobbying*)

Lobi adalah sebuah bentuk persuasi yang mengarah pada perubahan kebijakan di bawah jelajah sistem pengendalian. Kegiatan diarahkan pada para elit yang menjadi kunci dalam perumusan kebijakan di dalam suatu tingkat masyarakat tertentu. Sistem perubahan menentukan apakah suatu kebijakan harus dihapuskan atau perlu dikembangkan, agar tujuan dapat dicapai. Hal yang penting dipertimbangkan dalam melakukan lobi adalah: faktual dan jujur, tidak berbelit-belit, dan didukung data, diskusi diarahkan pada tinjauan kritis mengenai objek pembicaraan (sisi baik dan buruk).

c. Penggunaan Media Massa (*Mass Media Appeal*)

Media massa digunakan untuk mengembangkan dan menayangkan cerita-cerita yang bernuansa berita ke dalam media-media elektronik maupun cetak dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat umum. Teknik ini digunakan untuk mendesak para pengambil keputusan untuk menyepakati cara-cara pemecahan masalah yang telah teridentifikasi.

3. Kontes (*Contest*)

Kontes dilakukan apabila sistem sasaran tidak setuju dengan perubahan dan atau alokasi sumber serta masih terbuka bagi terjadinya komunikasi mengenai ketidaksepakatan ini. Termasuk ke dalam kategori teknik ini adalah:

a. Tawar-menawar dan Negosiasi (*Bargaining and Negotiation*)

Teknik negosiasi dilakukan apabila kesepakatan atas pelaksanaan perubahan yang harus dilakukan, masih belum dicapai dan masih perlu dirundingkan. Atau, kesepakatan mengenai perubahan yang diinginkan telah dapat dicapai, akan tetapi alokasi sumber yang diperlukan masih belum disepakati.

b. Aksi Masyarakat atau Kelompok Besar (*Large Group or Community Action*)

Teknik aksi sosial hanya dilakukan jika pekerja sosial berhadapan dengan situasi di mana masyarakat berada pada pihak yang dirugikan oleh pihak lain, dan pekerja sosial maupun masyarakat tidak melihat adanya kesamaan tujuan antara berbagai pihak yang seharusnya bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Namun, perlu menjadi catatan, bahwa penggunaan teknik aksi sosial memiliki risiko yang sangat besar, baik bagi masyarakat maupun

pekerja sosial sendiri, sehingga teknik ini biasanya menjadi pilihan terakhir dalam bimbingan sosial masyarakat.

Beberapa teknik aksi sosial yang biasa digunakan, di antaranya adalah:

- 1) Aksi Legal (*Legal Action*), misalnya demonstrasi.
- 2) Aksi Melawan Hukum (*Illegal Action*), misalnya ketidakpatuhan warga.
- 3) Gugatan “*Class Action*” (*Class Action Lawsuit*), yaitu teknik yang mengacu pada situasi di mana suatu kesatuan dituntut karena melakukan pelanggaran hukum tertentu dan diperkirakan bahwa pengadilan akan diberlakukan untuk keseluruhan masyarakat. Taktik ini sering digunakan dalam populasi yang rentan, seperti penderita penyakit mental kronis, gelandangan, dan anak.

Apabila dibandingkan dari ketiga model intervensi komunitas ini, maka model Rothman memberikan gambaran taksonomi yang lebih luas daripada model Glen, maupun model Netting dan kawan-kawan. Model Rothman memperlihatkan bahwa intervensi komunitas terdiri dari 3 (tiga) model besar, yaitu (1) model A: pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), (2) model B: perencanaan sosial (*social planning*), dan model C: aksi sosial (*social action*). Masing-masing dari ketiga model ini, dirinci ke dalam 12 (dua belas) dimensi, yakni: (a) kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat, (b) asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahan, (c) strategi perubahan dasar, (d) karakteristik taktik dan teknik perubahan, (e) peran praktisi yang menonjol, (f) media perubahan, (g) orientasi terhadap struktur kekuasaan, (h) batasan definisi penerima sistem pelayanan, (i) asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok dalam suatu komunitas, (j) konsepsi

mengenai penerima pelayanan, (k) konsepsi mengenai peran penerima pelayanan, dan (l) pemanfaatan pemberdayaan.

Kemudian, model Glen menunjukkan bahwa intervensi komunitas terdiri dari 3 (tiga) model, yakni: (1) pengembangan masyarakat (*community development*), (2) aksi komunitas (*community action*), dan (3) pendekatan pelayanan masyarakat (*community service approach*). Masing-masing dari ketiga model ini, dirinci ke dalam 4 (empat) dimensi, yaitu: (a) tujuan, (b) partisipan, (c) metode, dan (d) peranan.

Sementara, model Netting dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa intervensi komunitas juga terdiri dari 3 (tiga) model yang dimanifestasikan ke dalam taktik dan teknik yang lebih rinci. Ketiga model tersebut adalah: (1) kolaborasi (*collaboration*), (2) kampanye (*campaign*), dan (3) kontes (*contest*). Model kolaborasi dirinci ke dalam dimensi: (a) implementasi (*implementation*) dan (b) membangun kapasitas (*capacity building*), yang terbagi ke dalam parameter, yaitu: (i) partisipasi (*participation*) dan (ii) pemberdayaan (*empowerment*). Model kampanye dirinci ke dalam dimensi: (a) teknik edukasi (*education*), (b) teknik persuasi (*persuasion*), yang terbagi ke dalam parameter: (i) kooptasi (*cooptation*) dan (ii) lobi (*lobbying*) dan (c) penggunaan media massa (*mass media appeal*). Model kontes dirinci ke dalam dimensi: (a) tawar-menawar dan negosiasi (*bargaining and negotiation*), dan (b) aksi masyarakat atau kelompok besar (*large group or community action*), yang terbagi ke dalam parameter: (i) aksi legal (*legal action*), (ii) aksi melawan hukum (*illegal action*), dan (iii) gugatan “*class action*” (*class action lawsuit*).

Namun demikian, model-model intervensi komunitas di atas saling melengkapi di antara ketiga model tersebut. Dalam realitasnya, ketiga model tersebut dapat

dipraktikkan secara bersamaan, meskipun tidak keseluruhan dimensi dan parameter dari semua model tersebut dapat diterapkan. Hal ini sangat tergantung pada hasil asesmen dan rencana aksi yang dirumuskan.

Model intervensi komunitas yang lain, yaitu model Checkoway (1995) yang mengidentifikasi 6 (enam) strategi perubahan komunitas yang berbeda, yaitu (1) mobilisasi massa (*mass mobilization*), (2) aksi sosial (*social action*), (3) partisipasi warga masyarakat (*citizen participation*), (4) advokasi publik (*public advocacy*), (5) pendidikan populer (*popular education*), dan (6) pengembangan pelayanan lokal (*local service development*). Sementara, Hanna & Robinson (1994) mengidentifikasi 3 (tiga) model dasar pemberdayaan masyarakat (*basic models of community empowerment*), yakni (1) perubahan sosial tradisional (*traditional social change*), perubahan sosial aksi langsung (*direct action social change*), dan perubahan sosial transformatif (*transformative social change*).

Mencermati hal tersebut, sejatinya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan beberapa model intervensi komunitas dalam praktik makro pekerjaan sosial. Hal ini menjadi penting karena penelitian yang berkaitan dengan perbandingan model intervensi komunitas masih relatif jarang dilakukan di Indonesia. Padahal, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti Pemerintah, para akademisi dan peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan masyarakat sendiri membutuhkan hasil-hasil penelitian yang membekali sebagai landasan ilmiah dan dapat diaplikasikan (*applicable*) untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, penting prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Dalam hal ini, Septiarti & Widyaningsih

(2007) mengungkapkan bahwa pergeseran tata pemerintahan dari bentuk awalnya yang sangat sentralistis menuju ke desentralisasi serta ditegaskan dalam konteks otonomi daerah telah membawa perubahan yang substansial. Kewenangan, tanggung jawab dan keleluasaan berprakarsa untuk pengembangan potensi daerah telah berada sepenuhnya berada dalam kancan publik untuk berkembang menuju model pembangunan yang menjanjikan.

Fritz & Rhéaume (2014) menyatakan bahwa tujuan intervensi berbeda dalam berbagai situasi. Secara umum, seorang pelaksana intervensi membantu masyarakat untuk memahami, menangani, dan/atau mengubah situasi dan dapat melakukannya dengan berbagai cara. Intervensi ini dapat mencakup melakukan penelitian yang diperlukan, pendidikan kritis, pelatihan, pengembangan kepemimpinan, perencanaan strategis dan/atau menilai berbagai jenis tindakan.

Hal ini bukan hanya masyarakat sebagai subjek pembangunan, tetapi juga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Akmaruzzaman, Sumardjo, & Hariyoga (2013) mengungkapkan bahwa upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan mensinergikan program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah daerah dengan membentuk sebuah forum musyawarah kemitraan pembangunan. Forum musyawarah tersebut anggotanya terdiri dari *stakeholders*, mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mediator, motivator, fasilitator, dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dengan harapan masing-masing pihak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Westoby (2014), mengungkapkan bahwa definisi

pengembangan masyarakat tidak berada dalam apriori, tetapi terus-menerus diciptakan dan diperjuangkan dalam hubungannya dengan gagasan dan konsep lain. Kemudian, Westoby (2014), menegaskan bahwa terdapat beberapa konsep yang saling berlawanan, seperti pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan versus pembangunan yang berpusat pada manusia (*growth - centered versus people - centered development*), pembangunan endogen versus pembangunan eksogen (*endogenous versus exogenous development*), praktik dari atas versus praktik dari bawah (*top-down versus bottom-up practice*), dan orientasi pelayanan versus praktik pengembangan (*service-oriented versus developmental practice*).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berbagai model intervensi komunitas merupakan konsep penting yang perlu dipahami dan dipraktikkan dalam *setting* makro pekerjaan sosial, yakni di level komunitas atau masyarakat lokal. Dalam literatur pekerjaan sosial telah dikembangkan berbagai model intervensi komunitas, antara lain: (1) model Rothman, (2) model Glen, serta (3) model Netting dan kawan-kawan. Dalam praktiknya, ketiga model intervensi komunitas ini dapat dilakukan bersamaan karena bersifat saling melengkapi antara model yang satu dengan model yang lainnya.
2. Perlunya keterlibatan dan sinergitas antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat, yaitu Pemerintah, para akademisi/peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan masyarakat lokal sendiri.
3. Perlu penelitian yang mendalam berkaitan dengan perbandingan model intervensi komunitas yang masih relatif jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang membumi (*indigenous knowledge*) dalam konteks lokal masyarakat Indonesia penting dilakukan sebagai landasan ilmiah untuk dikembangkan dan dapat diaplikasikan (*applicable*) guna kepentingan masyarakat yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus menulis artikel jurnal dan mempublikasikannya. Terima kasih kepada Editor Team, Reviewer, dan Manager Jurnal Sosio Informa yang menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akmaruzzaman, S., & Hariyoga, H. (2013). Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 5 (1), 56.
- Barker, R.L. (1987). *The Social Work Dictionary*. Silver Spring, Maryland: NASW.
- Brager, G. & S. Holloway. (1978). *Changing Human Service Organizations: Politic and Practice*. New York: Free Press.
- Brager, G., H. Specht, & J. L. Torczyner. (1987). *Community Organizing*. New York: Columbia University Press.
- Checkoway, B. (1995). Six Strategies of Community Change. *Community Development Journal*, 30 (1), 2-20.

- Fritz, J.M. & Rhéaume, J. (Eds.). (2014). *Community Intervention: A Clinical Sociology Perspectives*. New York: Springer.
- Glen, A. (1993). Methods and Themes in Community Practice. In Buther, H. et. al. (eds.). *Community and Public Policy*. London: Pluto.
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>, 119.
- Hakim, B.R. (2010). *Rethinking Social Work Indonesia: Suatu Jelajah Kritis*. Jakarta: Graha Pena Jakarta.
- Hanna, M. & Robinson, B. (1994). *Strategies for Community Empowerment*. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
- Hawtin, M. & Smith, J. P. (2007). *Community Profiling: A Practical Guide*. Second Edition, McGraw Hill-Open University Press, England.
- Ife, J. (2002). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisations*. Second Edition. Australia: Longman.
- Midgley, J. (1997). Social Work and International Social Development. In M.C. Hokenstad & J. Midgley (Eds.). *Issues in International Social Work: Global Challenges for New Century*. Washington, D.C.: NASW Press.
- Netting, F.E., Kettner, P. M., McMurtry, S.L. (1993). *Social Work Macro Practise*, America: Longman.
- Pawar, M. 2014. *Social and Community Development Practice*. New Delhi: SAGE Publication India Pvt Ltd.
- Raharjo, A. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rothman, J. (1995). Approaches to Community Intervention. In Rothman, J., Erlich, J. L., Tropman, J. E. & Cox, F. M. (Eds.). *Strategies of Community Intervention*. Fifth Edition. Itasca, IL: F. E. Peacock Publishers, Inc.
- Sanders, D.S. (Ed.). (1982). *The Development Perspective in Social Work*. Honolulu: University of Hawaii School of Social Work.
- Septiarti, S.W. & Widyaningsih. (2007). Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal Berbasis Keterpaduan Dan Otonomi Daerah (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul). Diklus: *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6, 6-7.
- Westoby, P. (2014). *Theorising the Practice of Community Development: A South African Perspective*. England: Ashgate Publishing Limited.